



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : II /KEP/172.2-DPRD/VII/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 16 MEMBAHAS PELAKSANAAN TINDAK
LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membahas Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2023);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 2 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 16 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 16 DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas membahas Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus 16 berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam rapat paripurna.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 2 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,



ADE SUKRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 44 /KEP/172.2-DPRD/VII/2026
TANGGAL : 2 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 16 DPRD KABUPATEN BEKASI
MEMBAHAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD

NO	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	H. SUNANDAR, S.E	KETUA	F. PARTAI GOLKAR
2.	RIDWAN ARIFIN, S.H.	WAKIL KETUA	F. PARTAI GERINDRA
3.	NURHAYATI, M.Pd	SEKRETARIS	F. PDI PERJUANGAN
4.	NOVY YASIN, S.Kg	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
5.	MUHTADA SOBIRIN, S.Ag	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
6.	ADELIA PARAMITHA KARDIN, S.T	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
7.	HELMI, S.E	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
8.	TETEN KAMALUDIN, S.H.	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
9.	MARTINA NINGSIH, S.E.	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
10.	PUTRI RAMADHANTY, S.H.	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
11.	H. NURYASIN SUPARMIN, Lc.	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
12.	Dra. Hj. ANI RUKMINI, M.I.Kom	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	SAEFUL ISLAM, S.H.	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	H. AHMAD FAISAL, S.H.I	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
15.	HASAN BASRI	ANGGOTA	F. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
16.	H. MARJAYA SARGAN, S.Sos	ANGGOTA	F. AMANAT – PERUBAHAN
17.	JAMIL, S.E., S.Sos	ANGGOTA	F. AMANAT - PERUBAHAN
18.	Hj. NUNUNG HS, S.E.	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
19.	SUROHMAN, S.H., M.Kom	ANGGOTA	F. BINTANG PERSATUAN BURUH
20.	Hj. MIA EL DABO, S.Tr.Keb., S.T.	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,



ADE SUKRON